

ANALISIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN SIPOLHA NAULI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA SIPOLHA HORISON

Meylida Nurrachmania^{1*}, Benteng H. Sihombing¹, Triastuti¹, Sri Ulva Ramadani²

¹ Dosen Program Studi Kehutanan, Universitas Simalungun

² Mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas Simalungun

*E-mail: meylidanurrachmania@gmail.com

Abstrak :Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) berdasarkan dimensi akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan kelembagaan. Penelitian dilakukan pada Februari–Maret 2026 di Desa Sipolha Horison, Kabupaten Simalungun, menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 44 anggota KTH dengan teknik sensus, serta dianalisis menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan KTH Sipolha Nauli berada pada kategori tinggi dengan nilai indeks sebesar 78,46%. Secara rinci, dimensi akses memperoleh nilai 78,09%, partisipasi 80%, kontrol 79,36%, manfaat 79,63%, dan kelembagaan 75,53%. Pemanfaatan lahan HKm didominasi oleh sistem agroforestri seluas 15 ha dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa aren seluas 6 ha, yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan lingkungan. Tingginya tingkat pemberdayaan dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, partisipasi aktif anggota, kepatuhan terhadap aturan kelompok, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan akses pelatihan dan kemitraan, serta optimalisasi komunikasi internal guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan HKm.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, hutan kemasyarakatan, kelompok tani hutan, agroforestri

Abstract: *This study aims to analyze the level of empowerment of the Sipolha Nauli Forest Farmers' Group (KTH) in the management of Community Forests (HKm) based on the dimensions of access, participation, control, benefits, and institutional capacity. The study was conducted in February–March 2026 in Sipolha Horison Village, Simalungun Regency, using a quantitative descriptive approach supported by qualitative methods. Data were collected through questionnaires, interviews, and observations of 44 KTH members using a census technique, and analyzed using a Likert scale. The results indicate that the empowerment level of the Sipolha Nauli KTH falls into the high category with an index value of 78.46%. Specifically, the access dimension scored 78.09%, participation 80%, control 79.36%, benefits 79.63%, and institutional capacity 75.53%. Land use in the HKm area is dominated by an agroforestry system covering 15 ha and non-timber forest products (NTFPs) in the form of sugar palm plantations covering 6 ha, which contribute to increased income and environmental sustainability. The high level of empowerment is influenced by government support, active member participation, adherence to group rules, and the perceived economic and social benefits. However, institutional strengthening, improved access to training and partnerships, and optimized internal communication are needed to enhance the autonomy and sustainability of HKm management.*

Keywords: *community empowerment, community forests, forest farmer groups, agroforestry*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara

secara lestari dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya. Dalam konteks Indonesia, kebijakan perhutanan sosial, termasuk HKm, telah menjadi instrumen utama dalam mengurangi konflik tenurial, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Namun demikian, keberhasilan pengelolaan HKm tidak hanya ditentukan

oleh aspek kebijakan, tetapi sangat bergantung pada tingkat pemberdayaan kelompok tani hutan (KTH) sebagai pelaku utama di lapangan. Pemberdayaan mencakup kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengontrol pengelolaan, memperoleh manfaat, serta memperkuat kelembagaan kelompok (Rozalina, Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Triastuti, 2024). Tingkat pemberdayaan yang tinggi akan meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan hutan, sedangkan pemberdayaan yang rendah berpotensi menyebabkan ketergantungan dan kegagalan program (Maryudi et al., 2018; Suharjito et al., 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi HKm di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan kelompok, keterbatasan akses terhadap pasar dan permodalan, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan (Rakatama & Pandit, 2020; Fisher et al., 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum optimal dan ketimpangan dalam distribusi manfaat juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan pemberdayaan (Larson et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan HKm.

Di sisi lain, penerapan sistem agroforestri dalam HKm telah terbukti mampu menjadi solusi adaptif dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi hasil hutan, tetapi juga menjaga fungsi ekologis seperti konservasi tanah, air, dan keanekaragaman hayati (Nair, 2021; Mbow et al., 2018). Namun, keberhasilan implementasi agroforestri

sangat bergantung pada kapasitas kelompok dan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Desa Sipolha Horison, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan skema HKm melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli. Kelompok ini memanfaatkan kawasan hutan melalui sistem agroforestri dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Meskipun demikian, belum diketahui secara komprehensif sejauh mana tingkat pemberdayaan kelompok dalam mengelola HKm, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis tingkat pemberdayaan KTH Sipolha Nauli berdasarkan dimensi akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pemberdayaan kelompok tani hutan serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kapasitas dan keberlanjutan pengelolaan HKm di tingkat lokal.

II. BAHAN DAN METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025 di Desa Sipolha Horison, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara purposive karena merupakan wilayah yang telah menerapkan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat

pemberdayaan masyarakat melalui indeks pemberdayaan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman terkait faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan serta kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2019).

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli yang berjumlah 44 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus (total sampling), sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- Data primer, diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung di lapangan.
- Data sekunder, diperoleh dari studi pustaka, laporan instansi terkait, serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

1. **Kuesioner**, digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan berdasarkan dimensi akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan kelembagaan.
2. **Wawancara**, dilakukan secara semi-terstruktur kepada responden dan pihak terkait untuk menggali informasi lebih mendalam.
3. **Observasi**, dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan aktivitas pengelolaan HKm.
4. **Studi pustaka**, digunakan untuk memperoleh data pendukung dari literatur ilmiah dan dokumen resmi.

Variabel Penelitian

Variabel utama dalam penelitian ini adalah tingkat pemberdayaan masyarakat, yang diukur melalui lima dimensi, yaitu:

- Akses (kemampuan memperoleh informasi dan sumber daya)
- Partisipasi (keterlibatan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan)
- Kontrol (kemampuan mengendalikan pengelolaan)
- Manfaat (keuntungan ekonomi dan sosial yang diperoleh)
- Kelembagaan (kekuatan organisasi dan aturan kelompok)

Skala Pengukuran

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1–5, yaitu:

- 1 = sangat rendah,
- 2 = rendah,
- 3 = sedang,
- 4 = tinggi,
- 5 = sangat tinggi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan terlebih dahulu menghitung Indeks Pemberdayaan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{skor aktual}}{\sum \text{skor maksimum}} \times 100\%$$

Hasil indeks kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

- 0–20% = sangat rendah
- 21–40% = rendah
- 41–60% = sedang
- 61–80% = tinggi
- 81–100% = sangat tinggi

Hasil perhitungan indeks dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemberdayaan pada masing-masing dimensi. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

memengaruhi pemberdayaan serta merumuskan upaya peningkatan.

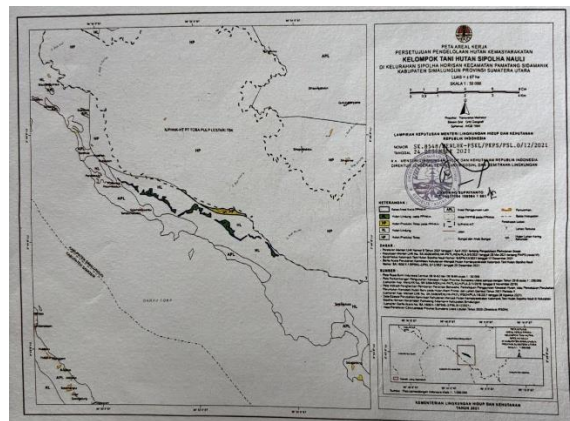
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Sipolha Horison terletak di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berada dalam kawasan dataran tinggi di sekitar Danau Toba. Secara fisiografis, wilayah ini didominasi oleh topografi berbukit hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar antara ± 900 – 1.200 mdpl. Kondisi ini didukung oleh iklim tropis basah dengan curah hujan yang relatif tinggi dan suhu udara yang sejuk, sehingga sangat mendukung pertumbuhan vegetasi hutan maupun sistem agroforestri (BPS

Kabupaten Simalungun, 2023; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Penggunaan lahan di desa ini didominasi oleh kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm), lahan pertanian, dan kebun campuran. Kawasan HKm yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli menjadi pusat aktivitas pengelolaan sumber daya hutan, dengan pola pemanfaatan berupa sistem agroforestri yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian serta pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti aren. Sistem agroforestri terbukti mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga fungsi ekologis seperti konservasi tanah dan air (Mbow et al., 2018; Nair, 2021).



Gambar 1. Peta Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Sipolha Nauli

Secara sosial ekonomi, masyarakat Desa Sipolha Horison sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang bergantung pada sumber daya lahan dan hutan. Tingkat ketergantungan terhadap kawasan hutan cukup tinggi, baik untuk kebutuhan ekonomi maupun subsisten. Keberadaan KTH Sipolha Nauli berfungsi sebagai kelembagaan lokal yang mengatur pengelolaan HKm, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas kelompok dalam

pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep perhutanan sosial yang menekankan peran kelembagaan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan (Maryudi et al., 2018; Fisher et al., 2019).

2. Pemanfaatan Lahan HKm di KTH Sipolha Nauli

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Lokasi penelitian diperoleh data yang bersaji dalam tabel 1

Tabel 1. Pemanfaatan Lahan HKm di KTH Sipolha Nauli

No.	Jenis Pemanfaatan	Potensi Lahan	Luas Lahan	Jumlah anggota	Keterangan
1.	Agroforestri	Kopi, Cabe, Durian, Jengkol, Pete, Alpukat, Kemiri	15	44	Dilaksanakan Peranggota
2.	HHBK	Aren	6	44	Dilaksanakan Peranggota

Berdasarkan Tabel Pemanfaatan Lahan HKm di KTH Sipolha Nauli, diketahui bahwa pemanfaatan lahan didominasi oleh sistem agroforestri dengan luas 15 ha (71,43%), sedangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa aren mencakup 6 ha (28,57%). Proporsi ini menunjukkan bahwa agroforestri menjadi strategi utama dalam pengelolaan HKm di lokasi penelitian.

Dominansi agroforestri mencerminkan upaya optimalisasi lahan melalui integrasi tanaman kehutanan dan pertanian yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis (Triastuti, Rozalina, R., Meylida Nurrachmania, Damanik, S. E., Simarmata, M. M., Sidabukke, S. H., & Sihombing, B. H., 2026). Sistem ini memungkinkan diversifikasi komoditas seperti tanaman kayu, kopi, dan tanaman buah, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Selain itu, struktur vegetasi berlapis dalam agroforestri berperan dalam konservasi tanah dan air serta menjaga stabilitas ekosistem (Mbow et al., 2018; Nair, 2021).

Sementara itu, pemanfaatan HHBK berupa aren dengan kontribusi 28,57% menunjukkan peran penting komoditas non-kayu dalam mendukung pendapatan masyarakat. Produk aren, seperti gula aren, memiliki nilai ekonomi yang relatif stabil dan dapat dipanen tanpa merusak tegakan hutan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari yang menekankan

pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Maryudi et al., 2018).

Namun, secara kritis, dominansi agroforestri yang cukup tinggi juga mengindikasikan adanya ketergantungan pada sistem produksi tertentu. Jika tidak diimbangi dengan diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko ekonomi, terutama terkait fluktuasi harga komoditas (Nurrachmania, M., Rozalina, R., Triastuti, T., Damanik, S. E., Simarmata, M. M., Sidabukke, S. H., Sihombing, B. H., & Purba, T., 2025). Selain itu, pemanfaatan HHBK yang masih terbatas pada aren menunjukkan bahwa potensi hasil hutan non-kayu lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan akses pasar, teknologi pengolahan, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha berbasis HHBK (Rakatama & Pandit, 2020).

3. Tingkat Pemberdayaan KTH Sipolha Nauli

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli berada pada kategori tinggi dengan nilai indeks sebesar 78,46%. Nilai ini mencerminkan bahwa kelompok telah memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), baik dari aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat, maupun kelembagaan. Tingginya indeks pemberdayaan ini menunjukkan bahwa program HKm di lokasi penelitian telah

berjalan relatif efektif dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi aktif, serta tapak.

memperoleh manfaat secara adil dan berkelanjutan (Maryudi et al., 2018). Dengan demikian, nilai indeks yang tinggi pada KTH Sipolha Nauli mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip perhutanan sosial telah mulai terinternalisasi dalam praktik pengelolaan di tingkat

Tabel 2. Indeks Pemberdayaan KTH Sipolha Nauli Berdasarkan Dimensi

No	Dimensi	Nilai Indeks (%)	Kategori
1	Akses	78,09	Tinggi
2	Partisipasi	80,00	Tinggi
3	Kontrol	79,36	Tinggi
4	Manfaat	79,63	Tinggi
5	Kelembagaan	75,53	Tinggi
Rata-rata		78,46	Tinggi

Berdasarkan Tabel Indeks Pemberdayaan KTH Sipolha Nauli, diketahui bahwa tingkat pemberdayaan secara keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 78,46%. Nilai ini menunjukkan bahwa kelompok telah memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Secara rinci, dimensi partisipasi memiliki nilai tertinggi sebesar 80,00%, yang mengindikasikan bahwa anggota kelompok terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Tingginya partisipasi ini mencerminkan adanya rasa memiliki terhadap program HKm dan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Larson et al., 2021).

Dimensi manfaat juga menunjukkan nilai tinggi sebesar 79,63%, yang berarti anggota kelompok telah merasakan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemanfaatan lahan melalui sistem agroforestri dan hasil hutan bukan kayu

(HHBK) seperti aren memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep agroforestri yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan (Mbow et al., 2018).

Selanjutnya, dimensi kontrol memiliki nilai sebesar 79,36%, yang menunjukkan bahwa anggota kelompok memiliki kemampuan dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan HKm. Kondisi ini mencerminkan adanya mekanisme internal yang berjalan cukup baik, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan kelompok. Menurut Suharjito et al. (2020), kontrol yang efektif merupakan indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dimensi akses memperoleh nilai 78,09%, yang menunjukkan bahwa anggota kelompok telah memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan eksternal. Akses yang memadai menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam

mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan (Rakatama & Pandit, 2020).

Sementara itu, dimensi kelembagaan memiliki nilai terendah sebesar 75,53%, meskipun masih dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan kelompok sudah berjalan, tetapi belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan komunikasi internal dan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masih menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan HKm (Fisher et al., 2019).

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pemberdayaan KTH Sipolha Nauli telah berjalan dengan baik, terutama didukung oleh tingginya partisipasi dan manfaat yang dirasakan anggota. Namun, untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keseimbangan antar dimensi pemberdayaan dapat tercapai dan pengelolaan HKm dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, meliputi aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Faktor pertama yang berperan penting adalah akses terhadap sumber daya dan informasi, di mana kemudahan dalam memperoleh legalitas lahan, teknologi, serta informasi pasar sangat menentukan kemampuan kelompok dalam mengelola hutan secara produktif. Akses yang memadai terbukti meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan dan peluang

ekonomi dalam pengelolaan hutan (Baynes et al., 2019).

Faktor kedua adalah modal sosial, yang mencakup tingkat kepercayaan, jaringan, dan norma yang berkembang dalam kelompok. Modal sosial yang kuat mampu meningkatkan kerjasama, memperlancar komunikasi, serta memperkuat kohesi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks perhutanan sosial, keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kekuatan hubungan sosial antar anggota dan antara kelompok dengan pihak eksternal (Putnam, 2020).

Selanjutnya, diversifikasi sumber penghidupan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pemberdayaan. Penerapan sistem agroforestri dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu memberikan alternatif sumber pendapatan yang dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan (Dawson et al., 2021).

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kapasitas adaptif masyarakat, yaitu kemampuan anggota kelompok dalam merespons perubahan lingkungan, ekonomi, dan kebijakan. Kapasitas ini mencakup pengetahuan lokal, pengalaman, serta kemampuan inovasi dalam pengelolaan lahan. Masyarakat dengan kapasitas adaptif tinggi cenderung lebih mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul (Reed et al., 2020).

Di sisi lain, dukungan kelembagaan eksternal, seperti pendampingan dari pemerintah, LSM, dan pihak swasta, juga berperan dalam memperkuat pemberdayaan kelompok. Dukungan ini dapat berupa pelatihan, akses permodalan, serta fasilitasi pemasaran produk. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak eksternal dapat menghambat kemandirian kelompok

jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas internal (Baynes et al., 2019).

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor utama yang berperan meliputi akses terhadap sumber daya dan informasi, modal sosial, diversifikasi sumber penghidupan, kapasitas adaptif masyarakat, serta dukungan kelembagaan eksternal. Secara umum, faktor internal seperti kekuatan modal sosial dan kemampuan adaptasi masyarakat menjadi penentu utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan, sementara faktor eksternal seperti akses dan pendampingan berperan sebagai pendorong awal. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada dukungan luar, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan kelompok dalam membangun kemandirian dan memperkuat kapasitas internal secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Sipolha Nauli atas izin, data, dan kerja sama selama penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan masyarakat Desa Sipolha Horison yang telah berpartisipasi aktif. Tidak lupa, penulis mengapresiasi dukungan dari rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. (2023). *Kabupaten Simalungun dalam angka 2023*.
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2019). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>
- Dawson, N., Martin, A., & Danielsen, F. (2021). Assessing the contributions of ecosystem services to human wellbeing: A disaggregated study in rural landscapes. *Ecosystem Services*, 47, 101234. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101234>
- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Statistik Perhutanan Sosial 2021*. Jakarta: KLHK.
- Larson, A. M., Sunderland, T., & Jagger, P. (2021). The role of collective action in forest governance and community forestry outcomes. *World Development*, 140, 105381. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105381>
- Mbow, C., van Noordwijk, M., Luedeling, E., Neufeldt, H., Minang, P. A., & Kowero, G. (2018). Agroforestry solutions to address food security and climate change challenges. *Current Opinion in Environmental*

- Sustainability*, 6, 61–67. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.10.014>
- Maryudi, A., Fisher, M. R., & Moeliono, M. (2018). Social forestry in Indonesia: A review of the regulatory framework and implementation. *Forest Policy and Economics*, 92, 144–152. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.04.002>
- Nair, P. K. R. (2021). *Agroforestry systems and environmental quality*. CRC Press.
- Nurrachmania, M., Rozalina, R., Triastuti, T., Damanik, S. E., Simarmata, M. M., Sidabukke, S. H., Sihombing, B. H., & Purba, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Peningkatan Usaha Kecil Menengah Di Pantai Titik Nol Km Barus, Tapanuli Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 177-182. <https://doi.org/10.36985/ax90mn79>
- Putnam, R. D. (2020). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Reed, M. S., Stringer, L. C., Dougill, A. J., Perkins, J. S., Athlopheng, J. R., Mulale, K., & Favretto, N. (2020). Reorienting land degradation towards sustainable land management: Linking sustainable livelihoods with ecosystem services. *Land Degradation & Development*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.1002/ldr.3443>
- Rozalina, Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Triastuti. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekowisata Di Dusun Bahoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 30-33. <https://doi.org/10.36985/tb364z30>
- Suharjito, D., Darusman, D., Nugroho, B., & Sundawati, L. (2020). Community empowerment in social forestry: Lessons learned from Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2), 89–98. <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.89>
- Triastuti, Rozalina, R., Meylida Nurrachmania, Damanik, S. E., Simarmata, M. M., Sidabukke, S. H., & Sihombing, B. H. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Sistem Agroforestri Berbasis Tanaman Durian Di Desa Manik Maraja, Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 6(1), 42-48. <https://doi.org/10.36985/hv8fyt93>